



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kebon Sirih Pangkas Anggaran ITF

Lokasi Sumir, Cenderung Pemborosan

JAKARTA – Komisi D DPRD DKI Jakarta memotong anggaran pendampingan pembangunan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF). Semula mencapai Rp10 miliar menjadi Rp6 miliar. Pasalnya, selain lokasi yang tidak jelas juga memicu pemborosan.

Anggota Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai, anggaran tersebut cenderung memicu pemborosan. Pasalnya, belum ada kejelasan soal lokasi, teknologi ITF ini.

“Ini target belum jelas, teknologi juga belum tahu apa yang dipakai, lokasi juga belum ada. Jadi anggarannya untuk apa,” ungkap dia kepada INDOPOS di gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

Menurut Yuke, seharusnya anggaran konsultan bisa disamakan dengan anggaran ITF yang sebelumnya berjalan. Pada anggaran sebelumnya, biaya konsultan hanya Rp2 miliar untuk satu lokasi.

“Kan sudah ada penetapan tipping fee pada ITF sebelumnya. Kenapa harus ada di pendampingan kembali? Kita kan sudah tahu angkanya,” ujar dia.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh juga merasa keberatan dengan rencana tersebut. Menurut dia, residu pengolahan sampah di ITF seharusnya menjadi tanggung jawab swasta yang membangun dan mengelola ITF tersebut.

“Saya tahu benar, mereka (swasta-red) dapat untung. Kok dibebankan ke kita (Pemprov DKI-red)?

Biarkan swasta yang mengelola, satu paket. Harusnya ITF itu solusi, bos,” kata Nova kepada INDOPOS di lokasi yang sama.

Mengetahui hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memutuskan untuk memotong anggaran konsultan. Namun, anggaran konsultan yang dipotong disesuaikan dengan anggaran pada tahun sebelumnya.

“Sudah, kita potong jadi Rp6 Miliar mengikuti yang sebelumnya, karena kalau Rp10 miliar kebanyakan itu,” tutur dia saat dikonfirmasi di gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

Ida pun setuju rencana berkunjung ke Bantargebang dan menemui Pemkot Bekasi. Dia ingin meminta kejelasan apa saja kompensasi sampah dari Jakarta.

“Salah satu prioritas juga, setelah KUA PPAS selesai, kita jadwalkan kunjungan ke sana. Bicara detail, kalau ada kompensasi kenapa kok ada kompensasi angka kecil-kecil,” ucap Ida.

Diamini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Dia menyatakan, Dewan juga akan memastikan rincian dana kompensasi sampah TPST Bantargebang kepada Pemerintah Kota Bekasi. DPRD DKI Jakarta ingin tahu alasan adanya beberapa jenis kompensasi untuk Bekasi.

Politisi Partai Gerindra itu merasa Bekasi mendapatkan beberapa kali uang dari DKI Jakarta.

“Kita mau tinjau ke sana. Saya mau diskusikan ini dengan Bekasi. Anda (Bekasi-red) minta hibah tapi hitung juga lewat tonase (kompensasi sampah). Ini aneh juga,” ucap dia di lokasi yang sama.

Sementara, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, setelah ITF dibangun di dalam kota, TPST Bantargebang hanya akan difungsikan sebagai tempat pembuangan residu hasil pengolahan sampah di ITF.

Karena itu, Dinas LH DKI menganggarkan rencana pembangunan fasilitas pengolahan residu ITF. “Bagaimana pun juga Bantargebang itu tetap diperlukan oleh DKI, paling tidak untuk mengantar residu dari ITF itu ke Bantargebang,” ujar Asep dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD, Senin (4/11).

Menurut Asep, di setiap titik lokasi memiliki teknologi yang berbeda. Karena itu, anggaran konsultan juga memiliki anggaran yang berbeda sehingga tembus Rp10 miliar. “Kami butuh tenaga ahli sebelumnya kami dibantu oleh anggaran Jakpro untuk menganggarkan,” kata Asep.

Nantinya, kata dia, para ahli akan bertugas untuk menghitung jumlah tipping fee dan mendampingi dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. “Jadi kami butuh tenaga ahli untuk melakukan review,” ungkap dia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih juga meminta agar DPRD DKI untuk tetap menganggarkan dana konsultan. Karena pengadaan lahan bisa saja dilakukan oleh pihak lain.

“Mohon dialokasikan untuk di Cakung Cilincung saja untuk 2020. Karena sebenarnya dua lagi bisa dianggarkan melalui beli lahan sendiri, Jakpro atau swasta,” tukas Andono. (aen)

PENGURANGAN ANGGARAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH

